**PERANAN DINAS SOSIAL DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TERHADAP PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Irwan Beltsazar Herman**

**NPM : 1511.1001.3509.127**

**Jurusan Administrasi Negara**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat. Dalam upaya mencegah atau menanggulangi Bahaya Narkoba dikalangan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap serta resiko bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Dinas Sosial dan BNK di Kabupaten Kutai Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitaif dimana peneliti mengumpulkan data-data yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya tentanghubungan sebabakibat dari dua variable atau lebih dalam suatu penelitian. Dengan menggunakan data yang diukur dengan menghitung jumlah atau persentase jawaban responden melalui angket/kuisioner yang diberikan kepada responden yang berjumlah 60 orang. Analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis adalah Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat berpengaruh signifikan terhadap masyarakat di Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci : Peranan Dinas Sosial dan BNK, Penanggulangan, Bahaya Narkoba, Kabupaten Kutai Barat.

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah Penyalahgunaan Narkoba yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan bagi bangsa indonesia. Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasiaonal (BNN) menyebutkan pada tahun 2018, jumlah penggunaan nakoba di indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,77 persen dari jumlah penduduk indonesia yang mengalami ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat setiap tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum didaerahnya maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari seluruh aspek yang ada di dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang tanpa ijin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba. Menurut UU Narkotika no 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan Bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, pada pasal 54 disebutkan bahwa “korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”. Penggunaan narkoba tanpa ijin dan bukan dikarnakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Zat atau bahan yang termasuk kategori Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat otak sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, pisikis/jiwa dan fungsi sosial.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari dihampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di indonesia sudah sampai tingkat yang sangat menghawatirkan, hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan dengan berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba. Penyalahguna narkoba yang termasuk pelajar biasanya terjadi karena keinggintahuan untuk mencoba-coba barang haram tersebut. Dari hasil Survei Nasional perkembangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa pada 18 Provinsi di Indonesia tahun 2016, didapatkan hasil bahwa sebagian besar pelajar/mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah disekolah. Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena ada akses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan narkoba tersebut.

Penelitian yang dilakakukan oleh sipeneliti berdasarkan data pada tahun 2017-2018.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui kendala penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
5. Untuk mengetahui apa saja yang mendukung penanggulangan bahaya narkoba yang dilaksanankan oleh Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
6. Untuk mengetahui Peranan keberhasilan / pencapaian penanggulangan bahaya narkoba.
7. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
8. **Manfaat Penelitian**
9. Mengetahui kendala penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
10. Mengetahui apa saja yang mendukung penanggulangan bahaya narkoba yang dilaksanankan oleh Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
11. Mengetahui Peranan keberhasilan / pencapaian penanggulangan bahaya narkoba.
12. Mengetahui peran Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Barat.
13. **LANDASAN TEORI**
14. **Peran Dinas Sosial**

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia (Permensos) No. 9 tahun 2017. Tentang standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Peran Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan adalah melaksanakan tugas sesuai dengan permensos dalam upaya Penanggulangan Bahaya Narkoba Kabupaten Kutai Barat, melalui upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan upaya Rehabilitasi bagi Penyahgunaan Narkoba.

1. **Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK)**

Badan Narkotika Kabupaten adalah suatu lembaga pemerintahan yang menangani masalah P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) di masyarakat. Peran BNK sebagai lembaga pemerintahan dalam menangani masalah Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat, melalui Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba, Upaya Pemberantasan Bahaya Narkoba, dan Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkoba.

1. **Bahaya Narkoba**

Narkoba adalah suatu zat, yang jika dimasukkan ke dalam tubuh, akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologis (kecuali makanan, air atau oksigen). Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

Pengertian Narkoba Menurut BNN, Narkotika dan Obat-obatan terlarang di singkat (NARKOBA) atau istilah lain Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan bahan/ jenis zat yang bisa menyebabkan kondisi kejiwaan / psikologi seseorang baik itu pikiran, perasaan dan perilaku dan yang lebih berbahaya adalah dapat membuat seseorang ketergantungan fisik dan psikologi.

1. **Penanggulangan Bahaya Narkoba**

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai nara pidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya tentang hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian, dengan menggunakan data yang diukur dengan menghitung jumlah atau persentase jawaban responden.

1. **Populasi dan Sampel**

Penelitian dilakukan pada Dinas Sosial dan BNK yang berada di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pengambilan jumlah sampel responden berjumlah 60 orang, dari total 100 orang populasi jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial, BNK, dan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Maka penelitian ini termasuk penelitian populasi dari pihak instansi sebagai pelaksana dan masyarakat.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah kuesioner / angket dimana kalimat pernyataan disusun dengan opsi jawaban yang tersedia dengan menggunakan skala. Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh dari sampel populasi sehingga ditemukan kejadian dan hubungan antar variabel.

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya melalui alternatif jawaban yang sudah peneliti sediakan.

1. **Teknik Ananlisa Data**

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah verfikatif kausalitas yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya tentang hubungan sebab akibat dari dua variabel yaitu, data variabel (Y) Penanggulangan Bahaya Narkoba dan data variabel (X) Peranan Dinas Sosial dan BNK, di kabupaten kutai batar. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana melalui program Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jumlah Responden Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RESPONDEN** | **JENIS KELAMIN** | **JUMLAH** |
| **L** | **P** |
| 1 | DINAS SOSIAL | 12 | 8 | 20 |
| 2 | BNK | 6 | 4 | 10 |
| 3 | MASYARAKAT | 21 | 9 | 30 |
|  | **JUMLAH** | **39** | **21** | **60** |

Sumber data : Jumlah responden kuisioner penelitian

Berdasarkan tabel diatas peneliti mengambil sampel 20 orang dari Dinas Sosial, 10 orang dari BNK, dan 30 orang dari masyarakat. Dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang peneliti ambil adalah 60 orang.

Tabel Kuisioner X

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Responden** | **SB** | **B** | **KB** |
| 1 | Dinas Sosial | 11 | 8 | 1 |
| 2 | BNK | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Masyarakat | 12 | 14 | 4 |
|  | **Jumlah** | **30** | **25** | **5** |

Data tabel : berdasarkan data kuisioner

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden terhadap kuisioner Peranan Dinas Sosial dan BNK (X) yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Tanggapan dari Dinas Sosial adalah 11 orang menyatakan Sangat Baik, 8 orang meyatakan Baik, dan 1 orang menyatakan Kurang Baik. Tanggapan dari BNK adalah 7 orang menyatakan Sangat Baik, 3 orang meyatakan Baik, dan 0 orang menyatakan Kurang Baik. Tanggapan dari Masyarakat adalah 12 orang menyatakan Sangat Baik, 14 orang meyatakan Baik, dan 4 orang menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tanggapan responden terhadap kuisioner (X) yang diberikan peneliti adalah 30 Sangat Baik, 25 Baik, dan 5 Kurang Baik.

Tabel Kuisioner Y

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Responden** | **SB** | **B** | **KB** |
| 1 | Dinas Sosial | 8 | 12 | 0 |
| 2 | BNK | 4 | 5 | 1 |
| 3 | Masyarakat | 10 | 17 | 3 |
|  | **Jumlah** | **22** | **34** | **4** |

Data

tabel : berdasarkan data kusioner

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden terhadap kuisioner Penanggulangan Bahaya Narkoba (Y) yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Tanggapan dari Dinas Sosial adalah 8 orang menyatakan Sangat Baik, 12 orang meyatakan Baik, dan 0 orang menyatakan Kurang Baik. Tanggapan dari BNK adalah 4 orang menyatakan Sangat Baik, 5 orang meyatakan Baik, dan 1 orang menyatakan Kurang Baik. Tanggapan dari

Masyarakat adalah 10 orang menyatakan Sangat Baik, 17 orang

meyatakan Baik, dan 3 orang menyatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tanggapan responden terhadap kuisioner (Y) yang diberikan peneliti adalah 22 Sangat Baik, 34 Baik, dan 4 Kurang Baik.

Tabel data kuisioner variabel X dan Y

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Skala Penilaian** | **X** | **Y** | **X2** | **Y2** | **XY** |
| 1 | Dinas Sosial | 50 | 48 | 132 | 120 | 124 |
| 2 | BNK | 27 | 23 | 75 | 57 | 63 |
| 3 | Masyarakat | 68 | 67 | 168 | 161 | 162 |
|  | **Jumlah** | **145** | **138** | **375** | **338** | **349** |

Data tabel : Berdasarkan data kuisioner X dan Y

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan antara variabel Peranan Dinas Sosial dan BNK (X) dan variabel Penanggulangan Bahaya Narkoba (Y).

Jika dua variabel memiliki hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, maka kemudian dinyatakan dengan koefisien korelasi. Maka rumus yang digunakan adalah Pearson Product Moment, dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

***rxy*** : Koefisien korelasi antara X dan Y

***N*** : Jumlah responden/sampel variabel X

***∑xy*** : Skor rata-rata dari X dan Y

***∑x*** : Jumlah skor item X

***∑y*** : Jumlah skor total (item) Y

ANOVA Tabel

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Peranan Dinas Sosial dan BNK\*penanggulanga bahaya narkoba | Between Groups | (Combined) | 11.688 | 2 | 5.844 | 25.830 | .000 |
| Linearity | 11.663 | 1 | 11.663 | 51.550 | .000 |
| Deviation from Linearity | .025 | 1 | .025 | .110 | .741 |
| Within Groups |  | 12.896 | 57 | .226 |  |  |
| Total |  | 24.583 | 59 |  |  |  |

 Sumber data : berdasarkan data spss

Berdasarkan hasi tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai **F hitung** adalah sebesar .110. Dalam hal ini taraf signifikan adalah 5% dengan N = 60, maka df =57 dan di dapat **F tabel** sebesar 2,42 maka dapat disimpulkan bahwa antara Peranan Dinas Sosial dan BNK dengan Penanggulangan Bahaya Narkoba terdapat hubungan yang linier secara signifikan karena F hitung (0,110) > F tabel (2.42).

ANOVAa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 11.663 | 1 | 11.663 | 52.353 | .000b |
|  | Residual | 12.921 | 58 | .223 |  |  |
|  | Total | 24.583 | 59 |  |  |  |

Sumber data : berdasarkan data spss

Dalam penelitian ini taraf signifikan adalah 5% dengan N = 60, maka df = 58 dan didapat **F tabel** sebesar 2,42, pada hasil olah data Anovaa diketahui **F hitung** sebesar 53.353. Hal ini berarti **F hitung** (53.353 > **F tabel** 2.94). Jadi **Ho** ditolak dan **Ha** diterima. Ini menunjukkan bahwa Peranan Dinas Sosial dan BNK memiliki hubungan terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba.

Pada hasil pengujian koefisien regresi linier sederhana dengan menggunakan **F hitung** sebesar 52.353 dengan taraf signifikan probabilitas adalah 0,000 < α 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Penanggulangan Bahaya Narkoba dengan persamaan regresi yaitu Y = .776+ 0,631X dengan (Y) Penanggulangan Bahaya Narkoba dan (X) Peranan Dinas Sosial dan BNK.

Berdasarkan hasil analisis statistik melalui cara diverifikasi dengan tabel correlations dan didapatkan perhitungan besarnya hubungan antara variabel Peranan Dinas Sosial dan BNK terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba diperoleh sebesar 0,689 (lihat kolom beta) yang berarti hubungan variabel sangat kuat dana arah hubungan positif dangan tingkat korelasi yang nyata dilihat dari 0,000 pada tingkat probabilitas < α 0,05. Dengan demikian maka hipotesinya adalah:

**Ha** : Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Dapat Berpengaruh Signifikan Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian penelitian dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap mengetahui Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan tubuh dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Misalnya, pecandu rentan mengalami masalah di kantor, sekolah atau keluarga, kesulitan keuangan, hingga berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar hukum. Narkoba bukan jawaban atas permasalahan dalam hidup, justru dapat merusak tubuh dan hubungan dengan orang lain.

Peran Dinas Sosial dan BNK Kabupaten dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di masyrakat melalui Upaya Rehabilitasi. Rehabilitasi Narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Melalui lembaga rehabilitasi narkoba mereka para korban penyalahguna narkoba diberikan pembinaan baik sikap maupun keterampilan. Dari pembinaan tersebut para korban penyalahguna narkoba memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sehingga para korban penyalahguna narkoba memiliki karakter dan watak menjadi warga masyarakat yang berjiwa sosial dan mampu membentuk warga negara yang baik.

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat. Diketahui nilai Y = .0776 + 0.631 X dan R square sebesar 0,474 berarti bahwa Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat sebesar 63.10 %.

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi diketahui bahwa R hitung memiliki nilai sebesar 0,689 dan R Square sebesar 0,474. Kemudian R Square dikalikan 100% (KD = r2 x 100%), maka hasilnya adalah 47,40 %. dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Diketahui juga bahwa Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten Dapat Berpengaruh Signifikan Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat 47.40 % ( Baik ).

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas dapat dikatakan bahwa Peranan Dinas Sosial dan Badan Narkotika Kabupaten dapat Berpengarug Signifikan Terhadap Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kutai Barat.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diajukan saran sebagai beriku.

Bagi pemerintah supaya lebih aktif secara langsung dalam upaya melakukan rehabilitasi. Perlunya dilakukan peninjauan secara berkala di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial agar lembaga rehabilitasi institusi penerima wajib lapor menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perlu dilakukan banyak sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika kepada masyarakat. Dalam menjalankan program rehabilitasi harus juga diperhatikan berbagai ragam kebutuhan pecandu agar pulih, seperti fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, dan hukum. Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya terlaksana secara setengah-setengah melainkan dapat terlaksana secara menyeluruh.

Bagi korban penyalahgunaan narkoba supaya korban tidak lagi mengkonsumsi narkoba, dan harus memiliki pola hidup yang sehat. Bagi masyarakat agar tidak mengucilkan para pengguna narkoba, hendaknya ikut berpartisipasi dalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya untuk meningkatkan penanggulangan terhadap bahaya narkoba agar dapat memanimalisir penyalahgunaan narkoba di kabupaten kutai barat. Pentingnya kordinasi antara Dinas Sosial, BNK dan lembaga lain yang menangani permasalahan bahaya narkoba dapat ditingkatkan agar penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba lebih optimal.

Perlunya pengembangan terhadap upaya-upaya rehabilitas di instansi atau lembaga pemerintah serta pada lembaga masyarakat agar para penyalahgunaan narkoba dapat disembuhkan. Serta pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta peran serta masyarakat dalam upaya penaggulangan bahaya narkoba.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, (2008). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis,*Cet. Ke 2, P.T. Gunung Agung, 2002. hlm. 53.

Kurniawan (2008). *Bahaya Narkoba dan Alkohol*. Bandung: Nuansa.

Tim Badan Narkotika Nasional. *Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang* P4GN. (2016).

BNN. (2007). Badan Narkotika Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja. *http://bnn.go.id.*

BNN.(2018). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang. *http://bnn.go.id.*

Depkes, R.I. (2006). *Pedoman Penyuluhan Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya* (NAPZA). Jakarta. *http://www.depkes.go.id*

[*http://www.academia.edu/14506686/pencegahan\_dan\_penanggulangan*](http://www.academia.edu/14506686/pencegahan_dan_penanggulangan) *narkoba.*

*https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga*